

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Pidie”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. H. M. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, Wakil Rektor I, Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk penyelesaian studi.
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Sekretaris Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie beserta seluruh staf yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis Ayahanda (alm) Muhammad Ali dan Ibunda Ummi Khatijah, yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
9. Teristimewa kepada kedua Mertua yang sangat penulis hormati dan sayangi terimakasih do`a dan dorongan semangat kepada penulis.
10. Teristimewa kepada istri tercinta, Maidarina S.Pd, yang selalu memberi motifasi dan anak-anak tersayang Fathia Mabruha, Rayyan Zalfa, Farisa Bilqis, Tharya Kaneishia, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2016

P e n u l i s

Khairil Syahril

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Implementasi Kebijakan Publik	13
2.1.1. Pengertian Implementasi	13
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan	14
2.3. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fisikal di Indonesia	19
2.4. Dana Otonomi Khusus	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Bentuk Penelitian	26
3.2. Lokasi Penelitian	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4. Populasi dan Sampel	27
3.5. Variabel Penelitian	28
3.6. Teknik Analisis Data	29

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN PIDIE	30
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie	30
4.1.1. Kondisi Geografis, Topografis dan Geohidrologis	30
4.1.2. Administratif	31
4.1.3. Kependudukan	34
4.1.4. Perekonomian	36
4.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Pidie	39
4.2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie	41
4.2.1. Tugas dan Fungsi	41
4.2.2. Struktur Organisasi	42
4.2.3. Visi dan Misi DPKKD	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	48
5.1. Hasil Penelitian	48
5.1.1. Karakteristik Responden	48
5.1.2. Variabel Penelitian	51
5.1.2.1. Komunikasi	51
5.1.2.2. Sumber-Sumber Kebijakan	58
5.1.2.3. Kecenderungan-kecenderungan	63
5.1.2.4. Struktur Birokrasi	70
5.2. Analisis Data	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran – saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

NO.TABEL	JUDUL TABEL	HAL
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan dan Gampong/Desa di Kabupaten Pidie	33
Tabel 4.2	Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Pidie	34
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pidie	35
Tabel 4.4	Tabel Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pidie	36
Tabel 4.5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2012-2015	38
Tabel 4.6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012-2014	39
Tabel 4.7	Jumlah PNS DPKKD menurut Golongan	44
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Utama DPKKD Kab. Pidie	47
Tabel 5.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	48
Tabel 5.2	Distribusi Responden Menurut Umur	49
Tabel 5.3	Distribusi Responden Menurut Masa Kerja	50
Tabel 5.4	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	51
Tabel 5.5	Pendapat Responden Tentang Kejelasan Konsep kebijakan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	52
Tabel 5.6	Pendapat Responden Tentang Kejelasan Tujuan/Sasaran dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	54
Tabel 5.7	Pendapat Responden Tentang Adanya Perangkat Aturan Yang Efektif dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	57
Tabel 5.8	Pendapat Responden Tentang Keahlian / Kemampuan Yang Dimiliki Komponen Pelaksana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	59

Tabel 5.9	Pendapat Responden Tentang Otoritas/Wewenang Yang Ada pada Komponen Pelaksana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	60
Tabel 5.10	Pendapat Responden Sumberdaya/Dana Yang Dimiliki Komponen Pelaksana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	62
Tabel 5.11	Pendapat Responden Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Komponen Pelaksana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie	63
Tabel 5.12	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	66
Tabel 5.13	Pendapat Responden Tentang fungsi struktur birokrasi dalam pelaksanaan Implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	69
Tabel 5.14	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	71
Tabel 5.15	Pendapat Responden Tentang Adanya Pengaruh dari Luar Organisasi dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus	71
Tabel 5.16	Daftar Rekapitulasi Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2014	86
Tabel 5.17	Daftar Rekapitulasi Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Dan TDBH Migas Alokasi Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015	86
Tabel 5.18	Daftar Rekapitulasi Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Dan TDBH Migas Alokasi Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016	87

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Pidie	32

